

SOAL PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN

Oleh Nurcholish Madjid

Tidak dapat dibantah bahwa peristiwa yang terjadi hampir setengah abad yang lalu, yaitu Sumpah Pemuda, mempunyai arti tersendiri dalam perkembangan bangsa kita. Dapatlah dikatakan bahwa pada tahun 1928 itu, fondasi kesatuan dan persatuan bangsa diletakkan, khususnya melalui tekad penyatuan segi bahasa dengan mengangkat bahasa Indonesia. Seorang warga Indonesia yang bertemu dengan seseorang dari negara berkembang, juga sebagian negara maju, akan merasakan betapa kemampuan kita berintegrasi secara nasional melalui bahasa persatuan sangat menarik perhatian dan mengagumkan mereka. Dalam keadaan kita tidak memiliki begitu banyak hal-hal yang dibanggakan sekalipun, bahasa Indonesia sebagai milik nasional kita akan selalu menjadi sumber kemantapan pada diri sendiri dalam bernegara dan berbangsa.

Maka memang sudah sepantasnya, setelah sekian lama melalui liku-liku proses yang panjang, pada tahun ini Sumpah Pemuda tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi dengan suatu kongres pemuda yang dimaksudkan untuk mencoba mencari perumusan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Perlu diingatkan bahwa yang dikehendaki ialah partisipasi. Biasanya istilah itu dipertentangkan atau dilawankan dengan istilah mobilisasi. Dalam partisipasi terdapat dorongan emosional atau motivasi yang *inheren* pada pihak pelaku partisipasi sendiri

yaitu rakyat, atau lebih khusus dalam hal ini pemuda. Karena itu partisipasi dilakukan dengan kesungguhan hati dan antusiasme, yang menjadi sumber tenaga, dan yang pada gilirannya nanti hal-hal itu amat erat hubungannya dengan produktivitas. Sedangkan mobilisasi merupakan hasil pengerahan tenaga oleh pihak yang sedang berkuasa, yang dengan sendirinya mengimplikasikan adanya paksaan. Karena itu mobilisasi selalu disangkutkan dengan pemerintahan yang kelewat kuat atau malah arbitrer sebagaimana terdapat di negara-negara komunis. Korelasi mobilisasi adalah resimentasi, yaitu suatu kebiasaan memaksakan disiplin dari atas, termasuk pengingkaran hak menentukan dan memilih sendiri pemimpin yang dikehendaki. Dan sesungguhnya cara-cara yang koersif atau memaksa-maksa serupa itu adalah petunjuk dari tidak adanya kemantapan kepada diri sendiri. Orang-orang atau kelompok-kelompok yang memperoleh kekuasaan secara tidak wajar, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pemerintahan di dunia ini, khususnya dunia komunis, akan selalu bersandar pada praktik-praktik koersif untuk memelihara kelangsungan kekuasaannya dari ancaman penggulingan atau *coup d'état* yang selalu dikhawatirkan. Maka cara yang tidak demokratis itu selayaknya tidak dilakukan oleh penguasa yang kenaikannya melalui jenjang-jenjang dan cara-cara yang taat-asas atau konsisten dengan nilai-nilai demokrasi.

Hal itu dikemukakan tentu saja bukannya tanpa relevansi dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini di tanah air kita. Umpamanya saja dengan apa yang disinggung tadi, yaitu peristiwa kongres pemuda yang dilaksanakan oleh KNPI. Di sini tidak dipersoalkan sah tidaknya klaim yang dibuat oleh organisasi serupa KNPI untuk mewakili seluruh pemuda Indonesia, sebab hal itu amat kompleks dan relatif saja nilainya. Tetapi kita persoalkan hal-hal kecil — tapi mungkin juga besar artinya — yang merupakan tumpahan gelombang protes menuju kongres tersebut. Umpamanya saja pernyataan-pernyataan di sana-sini, entah oleh siapa, bahwa KNPI dimaksudkan sebagai satu-satunya wadah kegiatan kepemudaan di Indonesia. Sekalipun semangat

pernyataan itu kemudian terbantah oleh pernyataan-pernyataan yang datang belakangan, termasuk oleh seorang pejabat yang cukup relevan yaitu tokoh dari Kopkamtib, namun sempatnya keluar pernyataan serupa itu hanya menunjukkan ketidakmampuan kita secara jujur menangkap semangat nilai-nilai yang kita *committed* kepadanya, sebutlah entah itu Pancasila, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dinamisme bukan statisme, partisipasi bukan mobilisasi, dan seterusnya.

Sesungguhnya kita memiliki perbendaharaan kultural yang amat berharga untuk menuntun kita dalam membimbing masyarakat yang kita kehendaki. Perbendaharaan itu ada dalam khazanah falsafah pendidikan nasional kita, yaitu ajaran yang monumental dari Ki Hajar yang mengatakan “*tut wuri handayani, ing madyo mbangun karso, ing ngarso sung tulodo*”. *Tut wuri handayani* adalah sejalan dengan partisipasi. Dan dalil itu berarti bahwa kita, terutama pihak pendidik rakyat termasuk pemerintah dan penguasa pada umumnya, tidak dibenarkan berdiri di depan sambil memegang seutas tali yang telah diikatkan pada leher rakyat untuk kemudian mengelanya ke arah tujuan yang kita tetapkan sendiri secara sewenang-wenang. Tetapi kita harus mengetahui arah gerak yang bersifat orisinal, natural sebagaimana dikehendaki oleh kemanusiaan itu sendiri (sebab kita percaya kepada nilai perikemanusiaan!) agar rakyat dapat menemukan dinamikanya sendiri, kemudian dilempangkan hanya dalam keadaan menyimpang yang benar-benar kritis. Selain hal itu dibenarkan oleh nilai-nilai luhur yang melandasi kenegaraan kita, juga tentu jauh lebih hemat daripada resimentasi terdahulu itu, dan terjamin akan kelangsungannya yang lestari. [❖]